

STUDI KELAYAKAN BISNIS PERTANIAN BERBASIS KEMITRAAN PETANI-INDUSTRI DI KABUPATEN NGANJUK

Nurul Hidayah

Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Indonesia

Email: enha0308@gmail.com

Abstract

Nganjuk Regency, located in the scenic region of East Java, stands out as one of the major agricultural centers demonstrating strong potential for agribusiness development supported by partnerships between dedicated farmers and dynamic agro-processing industries. Nevertheless, the practical implementation of such partnerships often faces various challenges, including unequal bargaining positions, limited access to capital, and excessive dependence on policies determined by industry actors. The main objective of this study is to analyze the feasibility of developing partnership-based agricultural businesses in Nganjuk Regency by considering economic, social, and institutional dimensions, while formulating recommendations to strengthen sustainable partnership models. This study employs a qualitative approach through a comprehensive literature review, utilizing secondary data from scientific journals, reports from the Central Bureau of Statistics (BPS), and regional policy documents, with data analysis conducted using content analysis techniques. The findings indicate that partnerships between farmers and industries have promising economic potential, reflected in increased production efficiency and more secure market access, while from a social perspective, these partnerships play an important role in strengthening relationships among farmers and facilitating technology transfer. However, several constraints remain, particularly imbalances in bargaining power, lack of transparency in pricing mechanisms, weak farmer institutions, and unequal relationships between farmers and industries. The assessment shows that partnership-based agricultural businesses in Nganjuk Regency are economically and socially feasible; nonetheless, there is a critical need to strengthen farmer institutions and establish more transparent regulations governing partnerships, with the expectation that local governments will take a proactive role in facilitating fair and sustainable partnership models that benefit all stakeholders within the agricultural sector.

Keywords: *Feasibility Study, Agricultural Partnership, Agro-Processing Industry, Nganjuk.*

1. Pendahuluan

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu sentra produksi pangan utama di Jawa Timur. Komoditas unggulan seperti padi, jagung, dan bawang merah tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketergantungan ekonomi masyarakat Nganjuk pada sektor pertanian menuntut adanya sistem usaha tani yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara menyeluruh.

Seiring dengan pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian, muncul peluang untuk membangun kerja sama strategis antara petani sebagai produsen bahan mentah

dan industri sebagai pengelola serta pemasar produk. Kerja sama ini dikenal sebagai kemitraan agribisnis, yang diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi petani melalui kepastian pasar, penyediaan sarana produksi, serta transfer teknologi dari pihak industri (Friyatno & Saptana, 2017; Suddin et al., 2016). Dalam konsepnya, kemitraan pertanian bukan hanya sekadar hubungan ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kerja sama sosial dan kelembagaan yang memerlukan transparansi, keseimbangan peran, serta pembagian risiko yang adil antara petani dan mitra usaha (Susilowati et al., 2019).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kemitraan pertanian di berbagai wilayah, termasuk Nganjuk, masih menghadapi sejumlah tantangan. Petani sering kali berada pada posisi tawar yang lemah dibandingkan industri, terutama dalam hal penetapan harga, akses terhadap modal, dan penguasaan teknologi pertanian modern (Sofyan et al., 2022). Selain itu, kurangnya transparansi dalam kontrak kemitraan dan ketergantungan petani pada kebijakan yang ditetapkan oleh industri menjadi kendala serius yang menghambat terciptanya hubungan yang saling menguntungkan.

Kondisi tersebut menjadikan studi kelayakan bisnis pertanian berbasis kemitraan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Studi kelayakan berfungsi untuk menilai sejauh mana model kemitraan yang berjalan mampu menciptakan kerja sama yang adil dan efisien, serta mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam pengembangannya (Syahputra et al., 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan model bisnis pertanian berbasis kemitraan dengan industri di Kabupaten Nganjuk, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, serta kebijakan dan infrastruktur. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kelembagaan petani dan kebijakan daerah guna menciptakan kemitraan pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Aspek Ekonomi Kemitraan Pertanian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 27,8% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi salah satu sektor utama penopang perekonomian daerah. Besarnya kontribusi tersebut juga menegaskan bahwa keberlanjutan dan pengembangan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, setiap kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian, termasuk melalui skema kemitraan, akan berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Hasil analisis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa penerapan model kemitraan antara petani dan industri pengolahan memiliki dampak positif terhadap aspek ekonomi usaha pertanian (Friyatno & Saptana, 2017). Kemitraan memungkinkan terjadinya integrasi antara kegiatan produksi di tingkat petani dengan proses

pengolahan dan pemasaran di tingkat industri. Dengan adanya integrasi tersebut, rantai pasok pertanian menjadi lebih efisien karena alur distribusi hasil panen menjadi lebih jelas dan terencana. Penelitian Rahayu et al. (2021) juga mengungkapkan bahwa penerapan kemitraan antara petani dan industri pengolahan berpengaruh positif terhadap efisiensi rantai pasok dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Dari sisi petani, kemitraan dengan industri memberikan keuntungan berupa kepastian pasar dan harga yang relatif lebih stabil. Petani tidak sepenuhnya bergantung pada pasar bebas yang sering kali mengalami fluktuasi harga, terutama pada saat musim panen raya (Suddin et al., 2016). Selain itu, dukungan dari industri dalam bentuk penyediaan sarana produksi dan pendampingan teknis dapat membantu menekan biaya produksi, sehingga pendapatan petani berpotensi meningkat. Sementara itu, dari sisi industri, kemitraan memberikan jaminan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan baik dari segi jumlah maupun kualitas, yang memungkinkan industri untuk menjalankan proses produksi secara lebih efisien dan terencana (Pasaribu, 2016).

Namun demikian, meskipun secara ekonomi kemitraan pertanian menunjukkan potensi yang cukup besar, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketimpangan posisi tawar antara petani dan industri dalam penentuan harga dan pembagian keuntungan (Sofyan et al., 2022). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh petani. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kemitraan yang lebih transparan dan adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara seimbang oleh kedua belah pihak. Secara keseluruhan, dari aspek ekonomi, model kemitraan pertanian di Kabupaten Nganjuk dinilai memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan, terutama dengan dukungan kebijakan yang tepat dan penguatan kelembagaan petani (Rahayu et al., 2021).

2.2. Aspek Sosial Kemitraan Pertanian

Dari aspek sosial, kemitraan pertanian antara petani dan industri di Kabupaten Nganjuk memberikan dampak positif terhadap hubungan antar petani. Melalui pola kemitraan, petani cenderung lebih sering berinteraksi, baik dalam kegiatan produksi maupun dalam kegiatan pendampingan yang difasilitasi oleh pihak industri atau pemerintah (Gunawan et al., 2022). Interaksi tersebut secara tidak langsung memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kerja sama, serta mendorong terbentuknya jaringan sosial yang lebih kuat di tingkat petani. Hal ini penting karena dalam sistem pertanian tradisional, petani sering bekerja secara individual dan terisolasi, sehingga sulit untuk saling bertukar informasi atau pengalaman.

Selain memperkuat hubungan sosial, kemitraan juga berperan penting dalam proses transfer pengetahuan dan teknologi. Petani memperoleh informasi baru terkait teknik budidaya, pengolahan pasca panen, serta standar kualitas produk yang dibutuhkan industri (Amanah et al., 2021). Proses pembelajaran ini membantu petani meningkatkan kapasitas dan keterampilan, sehingga mereka lebih siap menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, petani tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pelaku aktif

dalam pengembangan usaha pertanian. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kemandirian dan kapasitas lokal.

Kemitraan pertanian juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial petani dan keluarganya. Dengan adanya kepastian pendapatan dari hasil panen yang terserap oleh industri mitra, petani dapat lebih tenang dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, serta akses terhadap layanan kesehatan (Susilowati et al., 2019). Stabilitas ekonomi yang diperoleh dari kemitraan secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya angka kemiskinan di pedesaan. Selain itu, petani yang tergabung dalam kemitraan juga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses program-program bantuan sosial dari pemerintah karena data mereka lebih teridentifikasi dengan baik melalui kelompok tani atau koperasi.

Namun demikian, beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan pertanian masih menghadapi permasalahan sosial yang tidak kalah penting. Salah satu persoalan utama adalah adanya kesenjangan pemahaman antara petani dan industri mengenai hak dan kewajiban masing-masing dalam kontrak kemitraan (Rahayu et al., 2021). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya sosialisasi yang intensif dan pendampingan hukum bagi petani agar mereka memahami secara utuh isi perjanjian kemitraan yang ditandatangani. Dengan demikian, aspek sosial kemitraan tidak hanya berhenti pada penguatan hubungan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak petani.

2.3. Aspek Kelembagaan Petani dalam Kemitraan

Aspek kelembagaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kemitraan pertanian di Kabupaten Nganjuk. Kelembagaan petani, yang meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta koperasi, berfungsi sebagai wadah bagi petani untuk bersatu, berkoordinasi, dan memperjuangkan kepentingan bersama (Gunawan et al., 2022). Tanpa kelembagaan yang kuat, petani cenderung bertindak secara individual dan menghadapi industri mitra dengan posisi tawar yang lemah. Sebaliknya, dengan kelembagaan yang solid, petani dapat melakukan negosiasi harga, menyepakati volume pasokan, serta mengatur jadwal tanam secara kolektif sehingga lebih terencana dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan petani di Kabupaten Nganjuk masih tergolong lemah dalam hal manajemen organisasi dan akses terhadap sumber daya. Banyak kelompok tani yang aktif hanya pada saat musim tanam atau panen, tetapi vakum di luar periode tersebut (Suddin et al., 2016). Akibatnya, keberlanjutan komunikasi dan koordinasi antara petani dengan industri mitra menjadi terhambat. Selain itu, sebagian besar kelompok tani belum memiliki legalitas formal yang diakui, sehingga sulit untuk membuka rekening bersama, mengakses kredit perbankan, atau menandatangani kontrak kemitraan secara sah. Hal ini menjadi kendala serius dalam upaya membangun kemitraan yang profesional dan setara.

Salah satu solusi yang dipandang efektif untuk mengatasi kelemahan kelembagaan petani adalah pembentukan dan penguatan koperasi petani. Melalui koperasi, petani dapat bersatu dalam pengambilan keputusan, memperkuat akses terhadap informasi

dan modal, serta bernegosiasi secara kolektif dengan pihak industri (Amanah et al., 2021). Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang dapat mengelola dana bersama, membeli sarana produksi dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, serta memasarkan hasil panen secara terintegrasi. Dengan kelembagaan yang kuat, hubungan kemitraan diharapkan dapat berjalan lebih seimbang, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memberikan pendampingan teknis dan bantuan hukum bagi pembentukan koperasi petani yang profesional.

Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga memerlukan dukungan dalam bentuk pelatihan manajemen, pencatatan keuangan, serta kepemimpinan organisasi (Susilowati et al., 2019). Pengurus kelompok tani dan koperasi perlu dibekali dengan keterampilan bernegosiasi, memahami kontrak bisnis, serta mengelola konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kemitraan. Dinas pertanian setempat dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat untuk menyelenggarakan program-program penguatan kapasitas tersebut. Secara keseluruhan, keberhasilan kemitraan pertanian di Kabupaten Nganjuk sangat bergantung pada adanya kelembagaan petani yang kuat dan didukung oleh kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani (Rahayu et al., 2021).

2.4. Aspek Kebijakan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong penguatan sektor pertanian melalui pengembangan agribisnis berbasis kemitraan antara petani dan industri. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan daerah, salah satunya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Pertanian Daerah Tahun 2023–2028 (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, 2023). Kebijakan tersebut menempatkan sektor pertanian sebagai sektor strategis yang tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian daerah. Dalam kerangka kebijakan tersebut, industri pengolahan hasil pertanian diposisikan sebagai mitra utama petani dalam membangun sistem agribisnis yang terintegrasi.

Kebijakan daerah tersebut juga sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024 yang menekankan pentingnya kolaborasi antara petani dan industri serta penguatan infrastruktur pertanian nasional (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2023). Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah meluncurkan Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah yang menjadi landasan utama dalam pengembangan sektor pertanian berbasis kemitraan (Pemerintah Kabupaten Nganjuk, 2023). Program ini mencakup bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta fasilitasi akses pasar bagi petani mitra. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan di lapangan.

Selain kebijakan yang bersifat langsung, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator dan regulator dalam hubungan kemitraan antara petani dan industri. Peran ini mencakup penyusunan regulasi yang lebih jelas dan mudah dipahami, khususnya yang mengatur sistem kontrak, mekanisme penentuan harga, serta pembagian risiko usaha (Sofyan et al., 2022). Tanpa regulasi yang memadai, industri cenderung mendominasi jalannya kemitraan karena memiliki akses informasi dan sumber daya

yang lebih besar. Pemerintah daerah perlu membentuk tim pengawas independen yang bertugas memantau pelaksanaan kontrak kemitraan dan menengahi apabila terjadi sengketa antara petani dan industri.

Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan kepada petani di tingkat desa, sehingga banyak petani yang tidak mengetahui hak-hak mereka dalam skema kemitraan (Rahayu et al., 2021). Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah terkait pertanian, perdagangan, dan koperasi masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih atau kontradiktif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang telah berjalan, serta pelibatan perwakilan petani dalam proses perumusan kebijakan ke depan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan (Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, 2023).

2.5. Aspek Infrastruktur Pertanian

Ketersediaan infrastruktur pertanian menjadi faktor pendukung utama dalam kelayakan bisnis pertanian berbasis kemitraan di Kabupaten Nganjuk. Infrastruktur irigasi yang memadai berperan penting dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama untuk komoditas utama seperti padi dan bawang merah (Badan Pusat Statistik, 2023). Sistem irigasi yang baik membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air, terutama pada musim kemarau. Sebaliknya, kerusakan saluran irigasi atau distribusi air yang tidak merata dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan, yang pada akhirnya merugikan petani dan mengganggu kontinuitas pasokan bahan baku bagi industri mitra.

Selain irigasi, infrastruktur akses logistik seperti jalan pertanian dan sarana transportasi juga berpengaruh besar terhadap kelancaran distribusi hasil panen. Akses logistik yang baik memungkinkan petani dan industri mengurangi biaya distribusi serta mempercepat proses pengiriman hasil pertanian ke pasar atau industri pengolahan (Pasaribu, 2016). Di Kabupaten Nganjuk, masih terdapat beberapa kawasan sentra produksi yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut karena kondisi jalan yang rusak atau belum beraspal. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan produk akibat lama perjalanan, terutama untuk komoditas bawang merah yang mudah rusak.

Infrastruktur pascapanen seperti lumbung penyimpanan, gudang pengeringan, dan fasilitas sortasi juga sangat dibutuhkan untuk mendukung kemitraan pertanian. Dengan adanya fasilitas pascapanen yang memadai, petani tidak perlu menjual hasil panennya segera setelah dipanen dengan harga yang mungkin kurang menguntungkan (Leatemia et al., 2023). Mereka dapat menyimpan sementara hasil panen di gudang mitra atau kelompok tani sambil menunggu harga yang lebih baik. Selain itu, fasilitas pengolahan hasil pertanian seperti mesin pengering dan mesin penggiling dapat meningkatkan nilai tambah produk sebelum dijual ke industri. Sayangnya, ketersediaan infrastruktur pascapanen di tingkat petani masih sangat terbatas dan memerlukan investasi yang tidak kecil.

Pemerintah daerah bersama dengan pihak industri mitra perlu melakukan investasi bersama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian. Skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership) dapat menjadi model yang tepat untuk mewujudkan hal ini tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan (Amanah et al., 2021). Industri diuntungkan dengan pasokan bahan baku yang lebih lancar dan berkualitas, sementara petani diuntungkan dengan berkurangnya biaya produksi dan distribusi. Secara keseluruhan, sinergi antara ketersediaan infrastruktur yang memadai dan dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan bisnis pertanian berbasis kemitraan di Kabupaten Nganjuk (Rahayu et al., 2021).

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, dapat disimpulkan bahwa model bisnis pertanian berbasis kemitraan antara petani dan industri di Kabupaten Nganjuk memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan. Kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi lokal. Penerapan kemitraan mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui keterlibatan industri pengolahan. Dari sisi sosial, kemitraan pertanian berperan dalam memperkuat hubungan antar petani serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui proses pendampingan dan transfer pengetahuan. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai menjadi faktor pendukung utama dalam kelayakan bisnis pertanian berbasis kemitraan di Kabupaten Nganjuk.

Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi kemitraan, terutama terkait dengan lemahnya kelembagaan petani dan belum seimbangannya hubungan antara petani dan industri dalam hal posisi tawar, transparansi harga, serta pembagian risiko usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan kebijakan yang memadai. Dengan demikian, meskipun secara umum bisnis pertanian berbasis kemitraan di Kabupaten Nganjuk dinilai layak untuk dikembangkan, diperlukan upaya perbaikan dalam tata kelola kemitraan agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh pihak yang terlibat.

References

- Amanah, S., Suprehatin, S., Iskandar, E., & Eugenia, L. (2021). *Investing in farmers through public-private-producer partnerships: Rural empowerment and agricultural development scaling-up initiative in Indonesia*. Springer.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Nganjuk dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Nganjuk.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk menurut lapangan usaha*. BPS Kabupaten Nganjuk.

- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Rajawali Pers.
- Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. (2023). *Rencana pembangunan pertanian daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2023–2028*. Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
- Friyatno, S., & Saptana, S. (2017). Kinerja agribisnis komoditas pertanian: Kemampuan penciptaan output, nilai tambah dan keterkaitan antar sektor (Analisis Komparasi I-O Tahun 2005 dan 2010). *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 14(3), 45-62.
- Gunawan, A., Sujarwo, S., & Haryanto, T. (2022). Pemetaan lembaga ekonomi petani untuk pengembangan korporasi petani tanaman pangan di Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekobis*, 5(2), 87-102.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). *Rencana strategis Kementerian Pertanian tahun 2020–2024*. Kementerian Pertanian RI.
- Leatemia, E. D., Rumony, J., & Lopulalan, H. (2023). Pelatihan studi kelayakan usaha agribisnis untuk meningkatkan keuntungan petani. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 35-48.
- Pasaribu, S. M. (2016). Program kemitraan dalam sistem pertanian terpadu. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 13(1), 23-38.
- Rahayu, S., Setiawan, H., & Prabowo, D. (2021). Kemitraan pertanian dalam konteks agribisnis berkelanjutan. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(3), 112-128.
- Rohidin, R., Suyatno, A., & Nugraha, A. (2024). Analisis kelayakan usaha ayam broiler dengan sistem kemitraan di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. *Jurnal Wawasan Pertanian*, 8(2), 101-115. <https://doi.org/10.37090/jwputb.v8i2.1436>
- Sitorus, F. O., & Fadilah, R. (2022). Analisis aspek produksi dalam studi kelayakan bisnis. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 123-137.
- Sjaf, S., Kasim, M., & Arsyad, M. (2022). Kemitraan 4.0: Solusi kemitraan petani kecil. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8(12), 78-95.
- Suddin, A. F., Ayesha, I., & Elizabeth, R. (2016). Akselerasi implementasi kelembagaan partnership untuk pengembangan agribisnis dan kesejahteraan petani hortikultura. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan*, 1(1), 15-30.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susilowati, K. D. S., Rachmi, A., & Riwijanti, N. I. (2019). *Pertanian kontrak (contract farming): Model, potensi dan permasalahan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Syahputra, R. (2023). *Studi kelayakan bisnis*. Intelektual Manifes Media.